



AL-WIJDÁN: *Journal of Islamic Education Studies*.

Volume 7, Nomor 2, November 2022, p-ISSN: 2541-2051; online -ISSN: 2541-3961

Available online at <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan>

Received: September 2022

Accepted: Oktober 2022

Published: November 2022

Institusi Normatif dan Substantif Sebagai Poros Kebijakan Edukasi Untuk Menyadarkan Keberagaman Dalam Pendidikan Islam

Zuhri Fahrudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia

Email: zuhrifahrudin3@gmail.com

Abstract

People in religion cannot be separated from diversity, especially inter-religious, which has a relatively temporary awareness caused by internal and external impulses so that socio-religious friction occurs in Islamic society, normative and substantive institutions are one that can reduce frictions. Social-religious education through policies issued, on the other hand Islamic education also indirectly contributes through religious values and norms. This study uses descriptive qualitative data analysis by covering data reduction (data reduction), data presentation (data display), and conclusions or verification (conclusion drawing). With the existence of normative and substantive institutions, policies wisely to stabilize socio-religious friction include the need for a purely vertical and horizontal institutional structure, linearity/consistency between substantive and normative institutions and comprehensive and maximal in serving inter-religious communities.

Keywords: Normative and Substantive Institutions, Religion, Islamic Education

Abstrak

Masyarakat dalam beragama tidak dapat terlepas dari keberagaman khususnya inter agama yang memiliki kesadaran relatif sementara disebabkan oleh dorongan-dorongan internal dan eksternal sehingga terjadilah gesekan-gesekan sosial-agama di tengah masyarakat Islam, institusi normatif dan substantif adalah salah satu yang dapat meredakan gesekan-gesekan sosial-agama tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, disisilain juga pendidikan Islam secara tidak langsung ikut berkontribusi melalui nilai dan norma Agama. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan analisa data dengan mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*). Dengan adanya institusi normatif dan substantif kebijakan dengan bijak untuk menstabilkan gesekan sosial-agama diantaranya ialah dengan Perlunyastruktur lembaga murni secara vertikal dan horizontal,

Linearitas/konsistensi antara *institusi substantif* dan *institusi normatif* dan Komprehensif dan maksimal dalam melayani masyarakat inter agama.

Kata Kunci: Institusi Normatif dan Substantif, Beragama, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Keberagamaan dalam masyarakat merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang ada dalam suatu daerah, identitas ini tidak mungkin dapat dihilangkan karena sebagai ciri khas dan anugerah, beragam dari suku, budaya, hingga Agama secara internal juga beragam, tidak ada jaminan semakin banyak kuantitas manusia semakin berkualitas pula manusia dalam beragama, bahkan bisa jadi semakin sedikit manusia semakin berkualitas manusia dalam beragama, karena berbagai bidang yang memiliki peran dan fungsi berbeda-beda bisa mewujudkan tujuan bersama, tidak ada sifat egois antar orang, banyaknya manusia harus mampu bersaing dari segala bidang tentunya dengan persaingan yang sehat, dengan begitu manusia di daerah tersebut pasti berkembang dari segi ekonomi, politik, perdagangan, pertanian khususnya pendidikan Islam, sebagai masyarakat yang beragama tentunya harus memiliki kesadaran tentang perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan keberagamaan, Akan tetapi dalam hal ini masih jauh dari harapan oleh sebab dalam dirinya masih banyak keganjalan atas ketidakyakinan bahwa *mindset*

ketidakmampuan pasti bisa dilampaui, *mindset* seperti ini harus dirubah dengan keyakinan dan tekad yang kuat berlandaskan nilai-nilai Islam, daerah tidak bisa berkembang jika orang hanya berpangku tangan dengan modal pasrah dengan keadaan. Semua orang mampu menumbuhkembangkan daerah masing-masing, dengan cara berintegritas satu sama lain, tolong menolong, saling menguatkan, saling memberi semangat apapun yang dilaksanakan oleh masing-masing orang untuk tujuan bersama, karena semua bisa berubah mulai dari hal-hal yang terkecil dengan pendidikan Islam, pendidikan Islam mengajarkan orang proporsional dalam mengambil langkah dan sebagai jalan membuat orang termotivasi walaupun tidak secara materi, formulasi-formulasi dalam menggunakan dua identitas harus diketahui dan diajarkan kepada halayak umum dengan tujuan tidak ada salah kaprah dalam menjalani hidup yang mengakibatkan rusak secara internal.

Keberagamaan dalam masyarakat tentunya sesuai dengan norma agama dan masyarakat, karena kesadaran ini menambah

kerukunan inter kelompok atau antar kelompok yang dapat memberi kenyamanan dalam hidup bersama, sebaliknya bagi orang yang tidak memiliki sikap kesadaran keberagaman yang tidak baik dapat membuat orang sekitar risih tidak ada rasa nyaman, kebanyakan individu atau kelompok cenderung *status quo* yaitu mengagungkan lembaga atau ajaran yang diikuti, pendidikan Islam hadir untuk memberikan edukasi bahwa manusia diciptakan berbeda-beda antara satu dengan yang lain, manusia harus memiliki kesadaran tentang hal ini juga sebagai anugerah, karena dalam masyarakat Agama adalah nomor satu yang didalamnya ada norma-norma yang harus dilakukan oleh pemeluknya, ia hadir untuk memberi jalan kebenaran menurut pemeluknya. Dari bermacam-macam sifat dan sikap keberagaman secara individu atau kelompok di masyarakat, perlu untuk menyadarkan tentang nilai-nilai luhur dalam pendidikan Islam berupaya membangun masyarakat memiliki kesadaran keberagaman, karena jika berhubungan dengan keberagaman maka ada hubungan juga dengan emosional, sosial, ajaran bahkan sampai dengan budaya masyarakat, adanya institusi baik secara lembaga atau aturan-aturan juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat yang ada dalam pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia secara fundamental bergantung pada pengamatan.¹ Karena berhubungan dengan fakta-fakta sosial di masyarakat dan juga berhubungan dengan interaksi sosial dalam beragama di masyarakat, sedangkan analisis data menggunakan data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).²

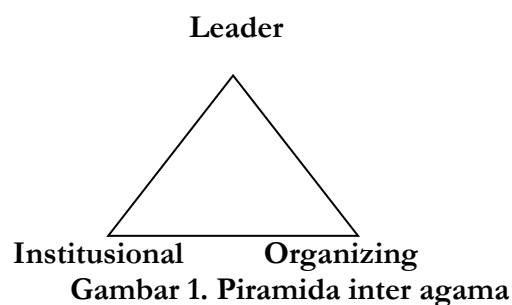
Hasil dan Pembahasan

Institusi Substantif dan Institusi Normatif

Institusi erat kaitannya dengan kesakralan yang sikapnya konvensional, adanya beberapa pendekatan dapat membuat institusi tidak konsisten dengan kebijakanyang dikeluarkan sebelumnya, dalam hal ini institusi merujuk pada lembaga atau struktur dan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Dari berbagai karakteristik cara pandang yang beragam, mulai dari cara beribadah, bermuamalah, bersiasah hingga cara menyampaikan inspirasi maka dari itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".³

Adanya proses secara sistematis dari segala posisi dan saling bersinergi secara vertikal dan horizontal dengan tujuan bersama yaitu kerukunan inter agamadi suatu daerah, akan tetapi ini masih jauh dari harapan banyak di dalam lembaga keinginan lebih besar dari pada kebutuhan bersama, diantaranya keinginan untuk naik jabatan secara terus menerus, sikut kanan sikut kiri tanpa memandang situasi kondisi yang terjadi adalah sistem balas dendam individu atau kelompok, pada akhirnya permasalahan-permasalahan intern lembaga yang perlu diselesaikan, dan ini tidak baik terhadap masyarakat bawah, keterlambatan akan menimpa masyarakat dan disalahkan adalah masyarakat, lebih mudah kerukunan meningkat jika antara *leader*, *institusional* dan *organizing* saling memiliki kepercayaan serta kejujuran, jika *leader*, *institusional* dan *organizing* tidak saling bersinergi maka keberagamaan di suatu daerah susah rukun. Di bawah ini adalah gambar piramida yang saling berkaitan dalam memajukan kerukunan inter agama antara *leader*, *institusional* dan *organizing* :



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa *leader* adalah pemimpin, pemimpin bersifat vertikal atau pemimpin bersifat horizontal yang memiliki kendali semua sistem, memiliki power yang kuat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat menentramkan orang khususnya di bidang pendidikan, seorang *leader* bukan hanya menyuruh bawahan untuk mencari informasi permasalahan yang ada di suatu daerah, melainkan *action* terjun langsung jika memungkinkan dengan tindakan murni dan alami. Bertolak belakang dari hal tersebut pemimpin atas kebanyakan yang *action* di tengah-tengah masyarakat, agar mengetahui apa yang harus dikembangkan dan disempurnakan dalam bidang pendidikan. *Institusional* yang dimaksud disini yaitu semua yang berkaitan dengan kebijakan *leader*, Undang-undang, ataupun peraturan presiden. Peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh *leader* orientasinya memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai objek sentral di suatu daerah, dimana peraturan atau kebijakan dibuat untuk kepentingan masyarakat agar tetap tentram dan nyaman, kebijakan ada atas jalan keluar yang awalnya formal

menjadi substansial. Sedangkan *organizing* disini dimaknai sebagai sistem yang ada di masyarakat disengaja ataupun tidak disengaja, salah satu contoh yang telah dikatakan sebelumnya bahwa masyarakat adalah objek sentral di suatu daerah, antara satu fungsi dengan fungsi yang saling membutuhkan, sama-sama *urgen*, tidak ada yang diunggulkan, tidak disebut negara jika tidak ada masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam suatu daerah, bukan hanya masyarakat yang penting, adanya *leader* juga sangat penting dalam suatu daerah, dari saking pentingnya “lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”.⁴ Jadi pada intinya tidak disebut negara jika tidak ada *leader* atau pemimpin pun sebaliknya tidak disebut negara jika tidak ada masyarakat, antara masyarakat dan pemimpin tidak bernilai jika tidak ada *institusional*. Akan tetapi dalam pembahasan ini tidak menitikberatkan kepada ranah politik, pembahasan lebih kepada ranah *institusional* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 dalam meningkatkan kerukunan antar agama.

Ada dua kategori dalam institusi negara, pertama *institusi normatif* institusi orientasi hanya sebagai wadah dari beberapa aspirasi yang disepakati bersama dalam wadah tersebut, hal ini terbentuk karena

tekanan dari masyarakat untuk meyakinkan sebuah entitas dan legitimasi. Kedua *institusi substantif* institusi ini lebih mengarah pada kesepakatan masyarakat yang dibuat dengan peraturan-peraturan tertulis. Senada dengan hal ini Powel mengatakan bahwa *institutional* terbagi dalam 2 kelompok pandangan yaitu *old-institutional theory* (OIT) dan *new institutional theory* (NIT).⁵ *old-institutional theory* (OIT) disebabkan oleh perkembangan yang ada di daerah yang memiliki latarbelakang berbeda-beda sehingga berpengaruh terhadap nilai dan norma, karena berbagai lapisan masyarakat dapat berubah dinamis tanpa diduga dan tanpa disadari, sedangkan NIT berpendapat bahwa *institutionalization* terjadi karena mempertimbangkan masyarakat yang berbeda-beda identitas eksternal pertimbangan ini antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Demikian juga hidup dalam bermasyarakat beragama telah ada peraturan untuk memberikan perlindungan pada sistem kemasyarakatan beragama yang bermuara pada kenyamanan kelompok sosial keagamaan, salah satu komitmen peraturan yang berpihak pada masyarakat umum adalah menyampaikan pendapat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”.⁶

Peraturan atau kebijakan *institusi substantif* telah benar-benar memperhatikan kerukunan kepada masyarakat khususnya inter umat beragama, *institusi substantif* memberikan power kepada bawahan untuk merealisasikan *institusi substantif* agar sesuai dengan tujuan dan prinsip tentang keberagamaan. Kesadaran antar individu adalah salah satu yang bisa membuat tujuan dan prinsip bisa diwujudkan dari masing-masing bidang vertikal ataupun horizontal, institusi memberikan edukasi secara intensif secara langsung ataupun tidak langsung kepada khalayak umum, salah satu untuk memberikan kepercayaan ialah dengan sifat dan sikap bijak dalam membuat peraturan, tanpa melihat hubungan spesifik yang membuat ketidakadilan terhadap individu atau kelompok. Banyak orang kritis dalam keberagamaan dalam masyarakat yang dilontarkan oleh akademisi maupun praktisi yang pakar dibidangnya, salah satunya isu utama ialah belum terciptanya kerukunan inter agama. Dari dua penyebab terhambatnya perkembangan keberagamaan diatas, ada beberapa solusi yang harus dilakukan dari semua pihak, sebagai berikut :

a. **Perlunya struktur lembaga murni secara vertikal dan horizontal**

Implementasi dari struktur lembaga sulit dilakukan oleh beberapa pihak yang ada di lembaga antara satu dengan yang lain memiliki sifat saling menjatuhkan, akibatnya

kemurnian struktur lembaga yang terjadi lebih meningkat bahkan tidak bisa dikendalikan. Kemurnian yang dimaksudkan disini adalah kemurnian secara vertikal dan horizontal, kemurnian secara vertikal hubungannya dengan spiritualitas atau homogenitas, orang yang ada disuatu lembaga harus memiliki kesadaran tentang hal ini apalagi hubungannya dengan keberagamaan. Sifat kekurangan, keinginan yang tinggi, kebutuhan lingkungan, kegengsian terhadap lingkungan dan bahkan kebiasaan yang ada di lembaga membuat antara satu dengan yang lain saling bersaing tidak sehat berdampak tidak ada perlindungan kepada masyarakat beragama, demikian ini juga dipengaruhi oleh sifat ketidakhati-hatian dengan hak dan kewajiban diri sendiri atau orang lain, memanipulasi suatu perkara yang tidak baik dibuat-buat menjadi baik atau sebaliknya perkara yang baik dibuat-buat menjadi tidak baik. Masyarakat bawah acuh tak acuh dan tidak mau taudengan hal ini, padahal masyarakat bisa berontak dan harus ada satu atau dua orang yang mampu menyuarakan ketidaknyamanan dari masyarakat terhadap lembaga.

Perbedaan antara hak dan kewajiban masing-masing orang harus mengetahui dalam rangka tidak dibodoh-bodohi oleh pihak orang-orang yang berada di *institusi normatif*, dengan menyuarakan aspirasi

beberapa persoalan-persoalan bukan berarti kurang ikhlasan dalam tanggung jawab dalam menjalani praktik keagamaan, semua perwakilan dari beberapa orang yang tidak mampu dengan kekuatan secara individual, sehingga membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya jika tidak ada yang meyarakan dari tingkat bawah masyarakat, maka yang terjadi dibuat enak oleh *institusi normatif*.

b. Linearitas/konsistensi antara *institusi substantif* dan *institusi normatif*

Amanah dalam tanggungjawab harus disadari bahwa adanya dua eksistensitas tersebut dibutuhkan oleh dibutuhkan oleh masyarakat inter agama, peraturan yang telah dibuat bersama dalam musyawarah di jalan dengan kehati-hatian dan komitmen sesuai dengan kesepakatan bersama, apalagi dalam musyawarah tersebut ikut serta yang beragama lain. Dalam inter agama antara orang satu dengan yang lain juga menyadari bahwa di dalam kebenaran sedikit pasti ada kesalahan sebaliknya di dalam kesalahan pasti juga ada sedikit kebenaran, kesimpulannya adalah saling menghargai pendapat inter agama. Salah satu contohnya adalah Interaksi antar organisasi keagamaan MD, Persis, dan NU di Pulau Kangean sering menimbulkan konflik.⁷ Konflik terjadi disebabkan oleh cara menafsirkan sebuah teks yang dapat dilihat dengan berbagai

narasi atau satu persoalan menggunakan berbagai narasi teks. Institusi substantif dan institusi normatif dalam hal ini harus membuat kebijakan sesuai dengan kesepakatan, tegas bukan karena dihadapkan dengan kelompok yang sesuai dengan ideologi yang dibela, jika tidak sesuai dengan ideologi mencari-cari kesalahan hingga akhirnya ditetapkan bersalah, disinilah tidak ada linearitas antara Institusi substantif dengan institusi normatif. Persoalan-persoalan yang ada di masyarakat inter agama biasanya orientasinya adalah tentang ideologi dan fiqih orang hanya menginginkan jusment hukum bukan logika hukum kafir mukmin dan halal haram, buktinya ketika ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat inter agama baik di dunia nyata atau di dunia maya ada pertanyaan-pertanyaan maka jawabannya halal haram, kafir mukmin tidak mau jawaban tersebut berfikir sedikit tentang alasan atau sebab perbuatan atau situasi kondisi tersebut halal haram atau mukmin kafir. Ini juga sebenarnya yang menimbulkan perpecahan inter agama, kelompok satu mengatakan kelompok lain kafir atau mukmin dan sebaliknya.

c. Komprehensif dan maksimal dalam melayani masyarakat inter agama

Masih berkaitan dengan poin yang diatas, walaupun di dalam masyarakat sangat

bermacam-macam pola pikiran dan ideologi, masyarakat yang majemuk ideologi dalam beragama bahkan fanatik terhadap tokoh, institusi substantif dan institusi normatif ini sangat berperan untuk mempertengahi persoalan di masyarakat khususnya persoalan antar agama, bukan hanya sistem atau peraturan yang berjalan dengan sendirinya, akan tetapi juga dari pihak yang berada di suatu lembaga, kebanyakan di masyarakat tidak sesuai dengan tujuan bersama, menekankan pada materi dan imateri yang di dalamnya ada uang dan jabatan, sulit bagi orang menemukan kebaikan dari institusi normatif jika tidak beruang dan memiliki jabatan, jika seseorang memiliki dua jenis tersebut alamat tidak susah dalam persoalan-persoalan di institusi normatif apalagi ada orang yang sudah kenal dalam lembaga tersebut. Dari beberapa pemetaan di masyarakat antar agama dikelompokkan menjadi tiga macam :

a) Kelompok Fundamental

Kelompok ini melihat orang lain hanya identitas eksternal tanpa melihat identitas internal, kedangkalan cara berfikir pada akhirnya menyimpulkan orang lain berada pada titik kesesatan permanen, kedangkalan ini susah untuk dimasukkan kebenaran-kebenaran jika narasi bertentangan dengan ajaran kelompok yang diagungkan, kemiripan kedangkalan dalam cara berfikir pada akhirnya

masyarakat Islam terbelakang tidak mampu bersaing. Kelompok ini juga disebut dengan *tekstualis-skripturalis*⁸ kemudian kelompok ini bertransformasi menjadi sebuah gerakan di tengah masyarakat yang dapat membuat orang lain pada kesesatan permanen tanpa mengkonfirmasi secara fakta lapangan dan tanpa mau mengetahui alur pikir *justment kontekstual*.

b) Kelompok Radikal

Kelompok ini kebalikan dari kelompok fundamental yaitu melihat orang lain pada identitas internal, kebanyakan orang salah sangka dalam mengartikan kelompok ini, mereka mengira bahwa kelompok ini adalah biang keladi kemerdekaan dalam bertindak yang dibungkus agama muaranya identik dengan kekerasan, asumsi kebanyakan orang mengarah pada identitas eksternal. Sedangkan pengertian radikal sendiri adalah berfikir mendalam koheren yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan radikalisme yang berkaitan dengan sikap kekerasan. Perbedaan antara radikal dengan radikalisme sangat berbeda Samsul Nizar menyatakan bahwa radikal sangat penting dilakukan karena berkaitan berpikir secara mendalam (mendasar) sampai pada akar objek yang dikaji. Hal demikian penting dilakukan seseorang untuk menemukan hal baru yang lebih objektif dengan syarat semua filter yang ada pada dirinya tidak digunakan untuk

sementara, agar kebenaran pada suatu objek dapat ditemukan. Sikap fanatik terhadap *authority* atau kelompok juga merupakan penghambat dalam menemukan kebenaran objektif, dengan berfikir komprehensif mendalam inilah yang disebut radikal, dalam posisi fikiran bukan gerakan. Seseorang yang dapat berfikir mendalam dapat berargumentasi secara tajam serta dapat dipertanggung jawabkan, radikal dalam hal ini juga bukan tentang suatu pergerakan yang identik dengan kekerasan, stigma harus dimusnahkan ditengah masyarakat agar pengertian radikal tidak negatif, yang harus diketahui perbedaan “radikal” dengan “radikalisme” adalah radikal respon mendalam seseorang terhadap tekstual atau kontekstual yang pada akhirnya menemukan hasil kebenaran objektif, sedangkan radikalisme lebih mengarah kepada pergerakan kelompok adakalanya mengarah pada budaya, seni bahkan politik dengan cara ekstrem. Demikian pula dalam berbagai kamus ditemukan bahwa makna radikalisme merupakan aksi mencolok untuk menyerukan paham ekstrem agar diikuti oleh banyak orang.⁹

c) Kelompok Moderat

Sesuai dengan kata moderat yaitu tidak berat sebelah, menyeimbangkan dengan objek dalam mengambil kesimpulan dari beberapa narasi tekstual atau kontekstual, disisi lain kelompok moderat

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, membawa visi-misi serta memegang prinsip Islam. Kelompok moderat ini lebih mengedepankan tengah antara dua pilihan dengan artian tidak berat sebelah dalam permasalahan juga membaca persoalan dikaji secara komprehensif secara tekstual ataupun kontekstual. Jika berada pada sikap individu atau kelompok ini berada antarafundamental dan radikal, di tengah masyarakat fenomena tidak terlalu diperdulikan biasanya hanya mengikuti yang memiliki *authority* yang sifatnya klasikal. Yusuf Al-Qardhawi menggunakan kata *Wasathiyah* (jalan tengah) menjelaskan bahwa kelompok ini dapat menyeimbangkan dalam menyimpulkan atau mengambil langkah tidak terlalu lunak juga tidak terlalu keras dan dapat diaplikasikan sesuai dengan konteksnya, begitu juga dengan mengambil langkah tetang suatu pikiran. Sehingga Yusuf Al-Qardhawi menentukan kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi Islam yang moderat, diantaranya adalah :

- 1) Mempertahankan esensi Islam dengan tetap mengaplikasikannya di dunia modern.
- 2) Mempertahankan keseimbangan antara elemen-elemen fleksibel Islam dan yang kaku.
- 3) Menghindari kekakuan dan sikap subordinasi.

- 4) Harus mendukung pemahaman Islam komprehensif karena dengan begitu akan luas pengetahuannya dan lebih bijaksana dalam menghadapi segala problematika.¹⁰

Keberagaman dalam Masyarakat Islam

Keberagaman dalam masyarakat inter umat sangat beraneka ragam sehingga cara mengaplikasikan agama juga berbeda-beda, ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, bisa dari lingkungan keluarga, pendidikan, budaya dan sebagainya. Atau bisa kepada personal seseorang dengan cara *doktrinal* dimana yang awalnya orang lemah lembut bisa jadi akhirnya kekerasan yang dikedepankan, apalagi dengan keagamaan orang sekarang orientasinya bukan kepada Ilmu Agama akan tetapi dikarenakan keterkenalan di dunia maya, antara kuantitas dengan kualitas tidak berbanding lurus. Dengan agama seyogyanya membuat orang mau berbuat baik, tapi kenyataannya tidak demikian, antara kelompok satu dengan yang lain lirik-lirikan saling merendahkan, kelompok satu dengan konsepnya cenderung tegas dan keras jadi dalam perkumpulan selalu merendah-rendahkan kelompok yang lain dengan menggunakan dalil dan referensinya sesuai dengan tokoh-tokohnya, mencari kesalahan-kesalahan yang ada di kelompok lain dengan dalil-dalil yang sesuai dengan konsepnya. Sebaliknya kelompok lain menggunakan konsep lemah

lembut juga dalam perkumpulannya dengan nada sindiran-sindiran yang sistematis. Semua kelompok mengambil dalil yang sama diramu dengan pemahaman masing-masing sesuai dengan konsep masing-masing kelompok, sehingga terjadilah gesekan-gesekan antar kelompok secara pemikiran dan gerakan. Dalam kelompok tersebut biasanya ada orang yang dinomorsatukan bisa disebut tokoh sentral dalam kelompok yang bisa mengarahkan sesuai dengan perintahnya, sayangnya pengikut yang kebanyakan masih awam laksana bebek yang ditunjuk oleh pemiliknya suruh ke selatan ikut ke selatan ke utara juga ikut ke utara, disinilah harus ada sikap kritis dilontarkan atau dianalisa dibenak masing-masing kebenaran tentang pergerakan tersebut, selanjutnya pengikut kelompok tersebut diperalat mengumpulkan suara lebih banyak dengan dalih tokoh yang dinomorsatukan telah dianiaya. Tokoh Agama hendaknya menjadi panutan bagi generasi bukan menjadi profokator untuk melakukan hal yang brutal, semestinya orang yang baru mengenal Islam latarbelakangnya keras justru harus masuk pada tokoh Agama yang lunak dengan tujuan amarah pada dirinya dapat dikendalikan secara maksimal, akibat tidak mengetahui jalan Agama yang lurus dan sesuai dengan kebutuhan dirinya maka semakin beringas serta mudah menyalahkan orang lain. Peran tokoh Agama menjadi penting mengingat bahwa

bangsa ini juga tidak melupakan peran tokoh-tokoh Islam dan bagaimana mereka berjuang melalui ormas dan lembaga-lembaga yang mereka dirikan guna membangun Indonesia secara tulus dan ikhlas.¹¹

a. **Kesadaran terhadap anak-anak**

Anak-anak dalam melakukan kesalahan atau bahkan kurang beretika di masyarakat sudah semestinya orang tua atau orang di lingkungan memberitahukan hal yang salah tersebut, oleh sebab pemikirannya masih belum matang yang memungkinkan memerlukan pengasahan secara bertahap hingga menjadi lebih matang. Anak-anak dalam kemungkinan besar belum bisa mengendalikan emosi secara maksimal atau bahkan dalam ranah spiritual hanya sebagai candaan.

b. **Kesadaran terhadap kakek-kakek**

Sifat dan sikap dari kakek berbeda ketika waktu muda yang mana semuanya masih bugar maksimal dalam bertindak, lain halnya ketika sudah umur senja semuanya berkurang kualitas dan kuantitas, kualitas berhubungan dengan semangat, cara berfikir, pikun, lupa dan lain sebagainya sedangkan kuantitas berhubungan dengan yang fisik gigi berkurang, pendengaran berkurang, mata mulai rabun dan lain sebagainya.

c. **Kesadaran terhadap Kemanusiaan**

Berkaitan dengan kesadaran kemanusiaan sangat luas cakupannya, karena berbicara manusia tidak lepas dengan sifatnya yang dinamis, keberagaman dari fisik dan psikis sampai dengan pola pikir tentu saja semua itu tergantung dari *background*/latar belakang dimana berada. Keberagaman boleh dikatakan *qodrat* dengan menyandang visi misi berbeda-beda akan tetapi muara akhirnya sama, sebab dengan keberagaman manusia dapat berkreasi tidak monoton dalam mengembangkan dan menyempurnakan nilai-nilai kehidupan.

Pendidikan Islam sebagai salah satu pondasi atau rujukan dari semua persoalan kehidupan, karena didalamnya mengajarkan serta dapat memberikan solusi sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Agama, bukan hanya dari sisi Agama melainkan peraturan atau kebijakan yang ada pada *institusi substantif* harus benar-benar memperhatikan kerukunan inter umat beragama, memberikan power kepada bawahan untuk merealisasikan *institusi substantif* agar sesuai dengan tujuan dan prinsip tentang keberagamaan dari *institusi normatif*, perbedaan antara hak dan kewajiban masing-masing orang harus diketahui dalam rangka tidak dibodoh-bodohi oleh pihak orang-orang yang berada di *institusi normatif*, dengan menyuarkan aspirasi beberapa persoalan-

persoalan bukan berarti kurang ikhlasan dalam tanggung jawab dalam menjalani praktik keagamaan, semua perwakilan dari beberapa orang yang tidak mampu dengan kekuatan secara individual, sehingga membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya jika tidak ada yang meyarakan dari tingkat bawah masyarakat, maka yang terjadi dibuat enak oleh *institusi normatif*, kesadaran antar individu juga adalah salah satu yang bisa membuat tujuan dan prinsip bisa diwujudkan dari masing-masing bidang vertikal ataupun horizontal.

Pendidikan Islam dalam Masyarakat

Pendidikan Islam perlu dikembangkan dan dioptimalkan dalam masyarakat Islam, kebanyakan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam hanya sebatas pengetahuan tanpa ada praktek secara konkrit, padahal nilai-nilai Islam harus dapat memberikan warna yang indah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai dan norma Agama. Pada masa kini pendidikan Islam semestinya membuat suatu asumsi positif terus berkembang dengan adanya substansi berkualitas, berbanding terbalik menjadi asumsi negatif dengan tidak adanya substansi tidak berkualitas, asumsi demikian harus diubah dengan *mindset* bahwa pendidikan Islam sebagian besar dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan visi, misi dan prinsip-prinsip dari *nash*.

Berhubungan dengan pendidikan Islam yang di dalamnya ada nilai-nilai yang perlu dikolaborasikan dengan semua aspek yang ada di masyarakat. Nilai tersebut terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: nilai P'tiqodiyah, nilai Khuluqiyah, dan nilai Amaliyah :¹²

a. Nilai P'tiqodiyah

Nilai P'tiqodiyah ini biasa di sebut dengan aqidah.¹³ Nilai ini berkaitan dengan aqidah Islam, aqidah Islam juga bisa disebut dengan keyakinan atau Iman terhadap yang fisika ataupun metafisika dalam hal ini tertuang dalam rukun Iman yaitu, Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir dengan keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun perbuatan dengan hasil menyadari bahwa Allah selalu mengawasi makhluk-Nya.

b. Nilai Khuluqiyah

Nilai Khuluqiyah yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa di sebut dengan moral.¹⁴ Akhlak sifatnya lebih universal kaitannya dengan tanggungjawab lebih secara vertikal dan standar peraturannya tertuang dalam *nash* (al Qur'an dan al Hadits), sedangkan moral sifatnya lebih relatif dan tekstual tanggung jawab lebih secara horizontal standart peraturannya normatif atau inormatif dan

langsung dan tidak langsung. Akhlak dan moral secara eksistensinya berbentuk perilaku yang diwarnai dengan keindahan dan kebaikan (etika dan estetika), contoh jujur, berkata yang baik, dan lain sebagainya.

c. Nilai Amaliyah

Nilai Amaliyah yaitu yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari yang berhubungan dengan Agama, dilakukan secara konsisten sesuai dengan aturan Agama sebab berhubungan dengan Allah swt dan manusia, nilai amaliyah ini ada dua unsur *pertama*, Pendidikan Ibadah memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai 'ubudiyah¹⁵ *kedua*, Pendidikan Muamalah memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun institusional.¹⁶

Kesimpulan

Pertama *institusi normatif* institusi orientasi hanya sebagai wadah dari beberapa aspirasi yang disepakati bersama dalam wadah tersebut, hal ini terbentuk karena tekanan dari masyarakat untuk meyakinkan sebuah entitas dan legitimasi. kedua *institusi substantif* institusi ini lebih mengarah pada kesepakatan masyarakat yang dibuat dengan peraturan-peraturan tertulis, kebijakan yang dikeluarkan patut dikatakan bagus jika mengedepankan keadilan inter Agama dan mempertimbangkan banyak hal, karena di

tengah masyarakat permasalahan-permasalahan sangat kompleks mulai dari permasalahan individu atau kelompok hingga penyangkut pada muamalah dan ibadah. Pendidikan Islam perlu untuk memberikan wadah pengajaran dan bimbingan khusus sesuai dengan nilai-nilai Agama diantaranya adalah nilai Khuluqiyah, nilai 'Itiqodiyah dan nilai Amaliyah

Referensi

- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir. *Ilmu Pendidikan Islam*, n.d.
- Arifin. *Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, n.d.
- Bustami, Abd Latif. "Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama Interaksi Antarorganisasi Keagamaan di Pulau Kangean," n.d., 10.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, n.d.
- "Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.Pdf," n.d.
- Powell, W. W, DiMaggio, P. J. "The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago," n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, n.d.
- Surwandono. *Pemikiran Politik Islam*. Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), n.d.
- "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA.Pdf," n.d.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA (UU).Pdf,” n.d.
Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, n.d.

¹⁶ Abdul Mujib.

(Endnotes)

¹Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, n.d.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, n.d.

³“UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA.Pdf,” n.d.

⁴Surwandono, *Pemikiran Politik Islam* (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), n.d.).

⁵Di Maggio Powell, W. W. P. J., “The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago,” n.d.

⁶“UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA (UU).Pdf,” n.d.

⁷Abd Latif Bustami, “Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama Interaksi Antarorganisasi Keagamaan di Pulau Kangean,” n.d., 10.

⁸Zainuddin, “Agama: Antara Fundamentalisme Dan Moderat,” n.d., <https://uin-malang.ac.id/r/151101/agama-antara-fundamentalisme-dan-moderat.html>.

⁹Samsul Nizar, “RADIKAL VS RADIKALISME,” n.d., <https://www.kampusmelayu.ac.id/2019/kolom-ketua/radikal-vs-radikalisme/>.

¹⁰“Dialog Islam Moderat Dalam Perdebatan.Pdf,” n.d.

¹¹“Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.Pdf,” n.d.

¹²Jusuf Mudzakir Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, n.d.

¹³Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, n.d.

¹⁴Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, n.d.

¹⁵Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*.